

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL*.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 0 Penyelenggara Jaminan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013a). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5420/pp-no-85-tahun-2013>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013b). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5421/pp-no-86-tahun-2013>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013c). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5426/pp-no-90-tahun-2013>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013d). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN*. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/PP Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/PP%20Nomor%2087%20tahun%202013%20tentang%20Pengelolaan%20Aset%20Jaminan%20Sosial%20Kesehatan.pdf)

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013e). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41477/perpres-no-107-tahun-2013>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013f). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41478/perpres-no-108-tahun-2013>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013g). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109*

Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41479/perpres-no-109-tahun-2013>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013a). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.*
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Perpres Nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Perpres%20Nomor%20111%20tahun%202013%20tentang%20perubahan%20Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202013%20tentang%20Jaminan%20Kesehatan.pdf)

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013b). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.*
<https://bphn.go.id/data/documents/13pr111.pdf>

Pemerintah Pusat Indonesia. (2013c). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.*
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202013%20tentang%20Jaminan%20Kesehatan.pdf)

Menteri Kesehatan. (2020). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT.*

Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku.* Rineka Cipta.
Novya, L., Bhatarendro, M. J., & Yanti, S. N. (2017). Gambaran Pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Sukadana Tahun 2016. *Jurnal Mahasiswa PSPD FK Universitas Tanjungpura*, 3(1), 697–708. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfk/article/view/23578>

Ridwan, A. (2022). Analisis Mutu Layanan Kesehatan dalam Perspektif Implementasi JKN di Rumah Sakit Chasan Boesoirie Ternate. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Sciences*, 01(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62394/scientia.v1i1.1>

Sastradimulya, F., & Nurhayati, E. (2015). Hubungan tingkat pengetahuan pasien tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan BPJS. *Prosiding Pendidikan Dokter.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/kedokteran.v0i0.1431>

- Stang, M. (2007). The structure of flower visitation webs: how morphology and abundance affect interaction patterns between flowers and flower visitors. In *Doctoral Thesis*. Leiden University.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN RND* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (1st ed.). Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). CV ALFABETA : Bandung., 2017.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Vera. (2016). Hubungan Promosi BPJS Kesehatan dan Pengetahuan Pasien Dengan Pemanfaatan Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Amurang Kabupaten *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Yustisia. (2014). *JURNAL HUKUM EDISI 90, SEPTEMBER-DESEMBER 2014, XXIII* (90th ed.). Fakultas Hukum UNS.
- Niha et al. (2019). Hubungan Karakteristik Individu dan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan Status Kepesertaan Masyarakat dalam Program JKN-KIS di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(5), 1–9.